

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KERJA
DENGAN SISTEM KONTRAK WAKTU TERTENTU
DI PT. PRIMA SEJATI SEJAHTERA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

RIZQI AULIA
C100150242

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KERJA
DENGAN SISTEM KONTRAK WAKTU TERTENTU
DI PT. PRIMA SEJATI SEJAHTERA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

RIZQIAULIA

C 100 150 242

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing



(Nuswardhani, S.H., S.U)

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KERJA
DENGAN SISTEM KONTRAK WAKTU TERTENTU
DI PT. PRIMA SEJATI SEJAHTERA**

**OLEH
RIZQI AULIA
C100150242**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 29 Juni 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji :

1. Nuswardhani, S.H.,S.U
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H.,M.H.,C.N
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H.,M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,


Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran pada pernyataan saya di atas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 Juni 2019

Penulis



RIQI AULIA
C100150242

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KERJA DENGAN SISTEM KONTRAK WAKTU TERTENTU DI PT. PRIMA SEJATI SEJAHTERA

Abstrak

Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan terutama terhadap penyedia Lapangan pekerjaan berperan sangat penting di dalam pembangunan nasional yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat untuk pengembangan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Didalam penerapannya dalam pelaksanaan pekerjaan di perusahaan yang dilakukan oleh pengusaha/perusahaan dengan pekerja/buruh yang berkaitan dengan produksi usaha yang dilakukan karyawan dan pegawai, selain untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan diadakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kerja/ Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT), hak dan kewajiban serta peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, serta mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan di dalam melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu. Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian hukum adalah menggunakan pendekatan normatif (doktrinal) yang meneliti tentang aspek-aspek hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif karena didalam penelitian menjelaskan secara menyeluruh terhadap peraturan pada proses aerta pelaksanaan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja/perjanjian kerja waktu tertentu. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam proses serta pelaksanaan perjanjian kerja/ Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus memenuhi peraturan yang mengaturnya, syarat-syarat administrasi dan syarat hukum yang terdapat pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian kesepakatan terjadi dengan ditandatanganinya suatu Perjanjian Kerja/ Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang di buat oleh pihak pengusaha/perusahaan berdasarkan perjanjian baku. Sehingga dengan adanya kesepakatan para pihak menimbulkan hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Hak pekerja/buruh merupakan kewajiban dari pengusaha/perusahaan PT. Prima Sejati Sejahtera. Demikian pula sebaliknya hak pengusaha/perusahaan merupakan kewajiban pekerja/buruh. Apabila terdapat salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian kerja/ perjanjian kerja waktu tertentu, maka harus dapat bertanggung jawab atas dasar wanprestasi serta apabila tidak melaksanakan perjanjian kerja dan tidak melaksanakan perajjian kerja yang telah disepakati atau perbuatan melawan hukum karena melakukan perbuatan yang tidak memenuhi peraturan yang disepakati/dibuat, dan tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu

Kata Kunci : karyawan, pegawai, perusahaan, perjanjian kerja waktu tertentu, PT. Prima sejati sejahtera

Abstract

Development in the field of employment, especially for job providers, plays a very important role in national development which functions to realize community welfare in community life for the development of a better standard of living for the community. In

its application in the implementation of work in the company carried out by employers / companies with workers / laborers relating to the production of business carried out by employees and employees, in addition to obtaining as much profit as possible also aims to meet the needs of the community. With the holding of this study aims to determine the process of implementing work agreements / Specific Time Work Agreements (PKWT), rights and obligations as well as applicable labor regulations, as well as knowing legal responsibilities if one of the parties makes a mistake in carrying out certain work time. The method of approach used based on legal research is to use a normative approach (doctrinal) that examines legal aspects, legal rules, legal principles towards the implementation of certain time employment agreements. This research is descriptive because in the research it explains thoroughly the rules in the process and the implementation of legal responsibility in the implementation of work agreements / work agreements at a certain time. The results of the study state that in the process and implementation of work agreements / Specific Time Work Agreements must meet the regulations governing them, administrative requirements and legal requirements contained in Article 52 paragraph (1) of Act No. 13 of 2003 concerning Labor. Then an agreement occurs with the signing of a Work Agreement / Specific Time Work Agreement that is made by the employer / company based on the standard agreement. So that the agreement of the parties raises a legal relationship to carry out rights and obligations. The right of workers / laborers is an obligation of employers / companies PT. Prima Sejati Sejahtera. Likewise, the right of employers / companies is an obligation of workers / laborers. If there is one party making a mistake in the work agreement / work agreement at a certain time, then it must be responsible on the basis of default and if it does not carry out the work agreement and does not carry out agreed work agreements or illegal acts that do not comply with the regulations agreed / made, and does not have a good intention in implementing the work agreement at a certain time

Keywords: employees, employees, companies, specific time work agreements, PT. Prima sejati sejahtera

1. PENDAHULUAN

Dalam pembangunan nasional dalam bidang ketenagakerjaan yang dalam pelaksanaannya untuk menyediakan lapangan pekerjaan, sarana tersebut digunakan pemerintah dalam pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan seluruhnya untuk perkembangan taraf hidup masyarakat yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, Menurut ketentuan Undang – undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 yang mengatur Perjanjian kerja mendefinisikan tentang perjanjian kerja sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang mempunyai syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Mengenai perjanjian pada umumnya, pengertian perjanjian diatur oleh KUHPdata Pasal 1313 yang mendefinisikan perjanjian

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Dengan adanya pengertian tentang perjanjian seperti ditentukan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Hal ini akan berlainan jika pengertian perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan perjanjian kerja. Dalam hal ini yang dimaksud adalah para pihak yang mengadakan perjanjian tidak dalam kedudukan yang sama dan seimbang, karna pihak yang satu yaitu pekerja mengikatkan diri dan bekerja di bawah perintah orang lain, yaitu pengusaha.¹ Di dalam era globalisasi dengan persaingan bisnis yang ketat seperti sekarang ini, perusahaan di tuntut meningkatkan kinerja usaha produksinya melalui pengelolaan yang efektif dan efisien, serta perusahaan dalam mengeluarkan biaya dalam melakukan kegiatan produksinya lebih kecil. Salah satu tuntutan yang diberikan oleh perusahaan upaya dengan memperkerjakan tenaga kerja seminimal mungkin untuk dapat memberi kontribusi maksimal sesuai dengan tuntutan yang diberikan, dengan cara memborongkan pekerja atau memperkerjakan pekerja/buruh dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Perjanjian kerja tersebut dibuat secara sepihak yang berdampak pada pekerja dalam melakukan suatu tindakan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati antara Pekerja dan perusahaan maka yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi, kewajiban yang harus dipenuhi pihak yang melakukan suatu perbuatan tidak dipenuhi sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap wanprestasi. Apabila pekerja tidak mematuhi/ menjalankan aturan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, sehingga pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan pertanggungjawaban hukum atas dasar perbuatan melawan hukum di dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilaksanakan di PT. Prima Sejati Sejahtera.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dapat dirumuskan yaitu 1) bagaimana bentuk dan proses pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT Prima sejati Sejahtera berdasarkan asas perjanjian,

¹ Djumadi, 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 31.

2) bagaimana hak dan kewajiban serta peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT Prima Sejati Sejahtera, 3) bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT Prima Sejati Sejahtera.

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui rumusan masalah yang sudah dirumuskan yaitu : 1) Untuk memahami dan mengetahui lebih jauh bentuk dan proses penerapan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja/buruh dengan pengusaha PT Prima Sejati Sejahtera, 2) Untuk mengetahui hak dan kewajiban serta kesesuaian penerapan peraturan yang berlaku dalam perjanjian kerja waktu tertentu 3) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Adapun manfaat terhadap penelitian berupa 1) Manfaat bagi penulis untuk menambah wawasan intelektual serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam bidang hukum. 2) Manfaat bagi masyarakat dapat membantu masyarakat untuk memberikan informasi tentang tanggung jawab hukum dalam perjanjian kerja waktu tertentu serta meningkatkan pemahaman pengetahuan terhadap masyarakat saat melakukan perjanjian kerja waktu tertentu terhadap hak dan kewajiban pengusaha/perusahaan, tanggung jawab hukumnya masing-masing pihak dalam melakukan pekerjaannya. 3) Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan dapat memberikan perkembangan terhadap wawasan khususnya terhadap ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja serta memberikan tambahan informasi yang berfungsi sebagai literatur acuan dalam referensi bagi perkembangan Ilmu Hukum.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan pada penelitian hukum yang menggunakan pendekatan normatif. Dalam hal ini penulis meneliti aspek-aspek hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dalam tanggung jawab terhadap pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada PT. Prima Sejati Sejahtera

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan Melakukan analisis dengan menggambarkan, menjelaskan secara menyeluruh berdasarkan fakta-fakta dan sistematis

terhadap peraturan pada proses pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu serta pelaksanaan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada PT. Prima Sejati Sejahtera.

Jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh dari a) Penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mencari data sekunder untuk mendapatkan bahan yaitu Bahan Hukum Primer adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bahan hukum sekunder dokumen-dokumen pendukung terkait, serta hasil penelitian hukum tanggung jawab hukum serta akta perjanjian kerja. b) Penelitian lapangan penelitian terhadap perjanjian kerja waktu tertentu lokasi di PT Prima Sejati Sejahtera Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Subyek penelitian HRD dan/atau staff dari pihak PT Prima Sejati Sejahtera. Metode Pengumpulan Data meliputi : Studi Kepustakaan, Penelitian Lapangan (Wawancara), kemudian Metode analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Prima Sejati Sejahtera

Sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/perusahaan, pekerja/buruh terlebih dahulu harus memenuhi kelengkapan syarat administrasi dan syarat hukum yang telah di tentukan pengusaha/perusahaan PT. Prima Sejati Sejahtera yaitu : 1) Surat Lamaran Kerja, 2) Kartu Kuning/ Kartu Tanda Pencari Kerja, 3) Daftar Riwayat Hidup, 4) Foto Kopi Ijazah, 5) Foto Kopi KTP/ Identitas Diri, 6) Foto Kopi Kartu Keluarga, 7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), 8) Surat Keterangan Sehat dari dokter, 9) Pas Foto 3 x 4

Kemudian adapun persyaratan lainnya yaitu harus memenuhi syarat hukum yang dijadikan pedoman dalam perjanjian kerja/perjanjian kerja waktu tertentu terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni : 1) Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, 2) Kemampuan atau kecakapan bagi pihak untuk melakukan perbuatan hukum, 3) Ada pekerjaan tertentu yang

diperjanjikan, 4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terpenuhinya syarat administrasi dan syarat hukum tersebut diatas maka kesepakatan antara pihak dengan melakukan pengisian formulir, kemudian para pihak melakukan penandatanganan terhadap perjanjian kerja yang sudah di rangkap 2 (dua) yang sudah di buat oleh pihak pengusaha/perusahaan PT. Prima Sejati Sejahtera.

Terjadinya Kesepakatan para pihak di dalam perjanjian kerja/perjanjian kerja waktu tertentu menimbulkan pengaruh untuk dilaksanakan perjanjian kerja/perjanjian kerja waktu tertentu yang para pihak terikat didalamnya sehingga timbul hubungan hukum antara pengusaha/perusahaan PT. Prima Sejati Sejahtera dengan pekerja/buruh dengan adanya kewajiban dan hak para pihak yang harus dipenuhi.

3.2 Hak dan kewajiban serta peraturan yang diatur dalam perjanjian kerja/perjanjian kerja waktu tertentu

Perjanjian kerja adalah dimana pihak buruh mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak majikan, selama waktu tertentu, dengan melakukan pekerjaan dan untuk menerima upah.

Terjadinya perjanjian kerja/perjanjian kerja waktu tertentu harus memuat syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu : 1) kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kemampuan atau kecakapan bagi pihak untuk melakukan perbuatan hukum, 3) ada pekerjaan tertentu yang diperjanjikan, 4) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja/perjanjian kerja waktu tertentu harus mencapai kesepakatan para pihak yaitu pihak pengusaha/perusahaan dengan pihak pekerja/buruh. Dengan adanya kesepakatan bagi para pihak yang merupakan subyek hukum di dalam perjanjian kerja/perjanjian kerja waktu tertentu terjadi hubungan hukum yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban para pihak didalam perjanjian kerja pengusaha/perusahaan PT. Prima Sejati Sejahtera

Adapun pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak diatur di dalam ketentuan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kewajiban dari pengusaha/perusahaan PT. Prima Sejati Sejahtera antara lain : 1) Pihak pengusaha/perusahaan wajib memberikan upah atau gaji bagi pekerja/buruh, 2) Pihak

pengusaha/perusahaan berkewajiban memberikan fasilitas dan kesejahteraan kepada pekerja/buruh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak dari pengusaha/perusahaan PT. Prima Sejati Sejahtera yaitu : 1) Pihak pengusaha/perusahaan PT. Prima Sejati Sejahtera berhak melakukan penempatan, pemindahan, evaluasi terhadap pekerja/buruh, 2) Pihak pengusaha/perusahaan PT. Prima Sejati Sejahtera berhak memberikan sanksi/peringatan lisan maupun peringatan tertulis kepada pekerja/buruh, 3) Pihak pengusaha/perusahaan PT. Prima Sejati Sejahtera dapat melakukan pemberhentian/pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh.

Adapun kewajiban pekerja/buruh yaitu : 1) Pihak pengusaha/perusahaan PT. Prima Sejati Sejahtera dapat melakukan pemberhentian/pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh, 2) Pihak pekerja/buruh berkewajiban mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku sesuai dengan peraturan perusahaan, 3) Pihak pekerja/buruh berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan instruksi kerja yang telah ditetapkan oleh pengusaha/perusahaan PT. Prima Sejati Sejahtera, 4) Pihak pekerja/buruh berkewajiban menjalankan instruksi yang layak dari atasan pimpinan, 5) Pihak pekerja/buruh berkewajiban menjalankan/mengikuti training sebagaimana diatur pengusaha/perusahaan PT. Prima Sejati Sejahtera. Hak pekerja/buruh yaitu : 1) Pihak pekerja/buruh berhak menerima upah dari pengusaha/perusahaan PT. Prima Sejati Sejahtera, 2) Pihak pekerja/perusahaan berhak memperoleh fasilitas dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan.

3.3 Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar Wanprestasi dan Atas Perbuatan Melawan Hukum

Pada dasarnya kesalahan didalam pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan salah satu pihak dapat menimbulkan permasalahan apabila terdapat kelalaian didalam pelaksanaannya karena tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kerja/perjanjian kerja waktu maka harus dilaksanakannya tanggung jawab hukum yang dibebankan atas perbuatan wanprestasi.

Adapun wanprestasi yang terdapat di dalam perjanjian kerja/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara lain : 1) Misalnya seperti perbuatan wanprestasi yang dilakukan pekerja/buruh sering datang terlambat masuk/mulai kerja saat habis istirahat, tidak masuk

kerja tanpa keterangan, pulang lebih awal saat jam kerja sedang berlangsung tanpa ijin dari atasannya, pekerja/buruh dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara. 2) Misalnya perbuatan wanprestasi yang dilakukan pengusaha/perusahaan yaitu pengusaha/perusahaan tidak memberikan upah lembur, serta tidak memberikan gaji sesuai dengan yang ada di dalam perjanjian, sehingga pengusaha/perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 1243 KUHPer.

Akibat wanprestasi yang dilakukan pekerja/buruh tersebut merugikan pihak pengusaha. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka pihak pengusaha/perusahaan dapat menuntut pekerja/buruh ke pengadilan berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara perbuatan wanprestasi untuk mengganti kerugian. Kemudian akibat dari wanprestasi yang dilakukan pengusaha/perusahaan pihak pekerja/buruh mengalami kerugian yang, maka pihak pekerja/buruh dapat menuntut ganti kerugian. Didalam penyelesaiannya apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka pihak pekerja/buruh berdasarkan Pasal 1243 KUHPer dapat menuntut pengusaha/perusahaan ke pengadilan untuk mengganti kerugian.

Adapun perbuatan melawan hukum yang terdapat di dalam perjanjian kerja/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara lain : 1) Perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerja/buruh yaitu misalnya mencuri, pekerja/buruh dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, 2) Misalnya terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha/perusahaan yaitu pengusaha/perusahaan yang tidak menaikkan gaji pekerja/buruh sesuai dengan standar UMR, atau gaji yang diberikan kepada pekerja/buruh tidak sesuai didalam perjanjian kerja yang diperjanjikan oleh pengusaha/perusahaan atau tidak menaikkan gaji pekerja/buruh sesuai dengan standar UMR yang telah naik, pihak pengusaha/perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang mencuri merugikan pengusaha/perusahaan, apabila kerugian yang ditimbulkan kecil masalah tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah. Apabila pencurian yang dilakukan dengan kerugian yang besar dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka

perusahaan dapat melakukan penuntutan dan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum karena pekerja/buruh pengusaha/perusahaan dapat menuntut pekerja/buruh ke pengadilan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Adapun akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha/perusahaan merugikan pekerja/buruh apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka pihak pekerja/buruh yang dirugikan dapat menuntut pengusaha/perusahaan ke pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara

4. PENUTUP

Pertama proses Pelaksanaan Perjanjian Kerja/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pengusaha/Perusaan Dan Pekerja/Buruh, Sebelum terjadinya kesepakatan dalam melakukan perjanjian kerja antara kedua belah pihak yaitu sebelum dilaksanakan test untuk mengetahui keahlian pekerja/buruh terhadap pekerjaan yang diperjanjikan/disepakati oleh pekerja/buruh, maka terlebih dahulu pekerja/buruh harus memenuhi kelengkapan syarat administrasi dan syarat hukum yang sudah ditentukan oleh pengusaha/perusahaan PT. Prima Sejati Sejahtera.

Setelah memenuhi syarat tersebut maka para pihak melakukan perjanjian, terjadinya perjanjian karena pihak pekerja/buruh dengan pihak pengusaha/perusahaan telah menandatangani perjanjian kerja, setelah sepakat dan setuju maka pekerja/buruh boleh melakukan pekerjaan yang sudah di sepakati/diperjanjikan sesuai yang sudah ditentukan oleh pihak pengusaha/perusahaan. Kemudian masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban.

Kedua, kedua belah pihak yang merupakan subyek hukum, yang peraturan hak dan kewajibannya terdapat di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak dan kewajiban yang terdapat didalam perjanjian kerja waktu tertentu yang menjadi pedoman para pihak untuk melaksanakan perjanjian kerja serta syarat perjanjian kerja yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh pengusaha/perusahaan PT. Prima Sejati Sejahtera dan Pekerja/Buruh. yang dimana hak pengusaha/perusahaan merupakan kewajiban dari pekerja/buruh begitu juga sebaliknya, Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan atau

melaksanakan yang sudah diperjanjikan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan maka harus bertanggung jawab. Pertanggung jawaban tersebut dapat berupa pertanggung jawaban hukum berdasarkan perbuatan wanprestasi pasal 1239 KUHPer dan harus melaksanakan penggantian biaya ganti rugi apabila ada pihak yang dirugikan berdasarkan Pasal 1243 KUHPer. Serta pertanggung jawaban hukum atas Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPer.

Ketiga, Tanggung jawab hukum terhadap kesalahan wanprestasi yang dilakukan pekerja/buruh misalnya sering datang terlambat masuk/mulai kerja saat habis istirahat, tidak masuk tanpa keterangan, pulang lebih awal saat jam kerja sedang berlangsung tanpa ijin dari atasannya, Maka pihak pengusaha/perusahaan dapat menuntut pekerja/buruh berdasarkan perbuatan wanprestasi untuk mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 KUHPer. Adapun kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha/perusahaan yaitu tidak memberikan upah lembur, serta tidak memberikan gaji sesuai dengan yang ada di dalam perjanjian. Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pekerja/buruh mengalami kerugian maka dapat melakukan penuntutan berdasarkan perbuatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPer. Adapun terhadap Perbuatan Melawan Hukum Misalnya terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pekerja/buruh yaitu yang mencuri apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka perusahaan/pengusaha yang dirugikan dapat melakukan penuntutan terhadap pekerja/buruh berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer. Adapun terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha/perusahaan yang tidak menaikkan gaji pekerja/buruh sesuai dengan standar UMR, atau gaji yang diberikan kepada pekerja/buruh tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh pekerja/buruh dengan pengusaha/perusahaan maka pihak pekerja/buruh yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian melalui jalur hukum berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPer.

DAFTAR PUSTAKA

Djojodirdjo, Moegni, 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Djumialdi, F.X., 1996.*Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Fuady, Munir, 2002.*Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi, 1986.*Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- H.S, Salim, 2003.*Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Joni Bambang S, R, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia.
- J. Moleong, Lexy, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Kartasapoetra, 1986.*Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta : Bina Aksara.
- Qirom Meliala, Syamsudin, 2007.*Pengertian Asas Itikad Baik Di Dalam Hukum Indonesia*, Surabaya : Mitra Ilmu.
- Satrio, J, 1993. *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang) Bagian Pertama*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Sentosa, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, Bandung : CV. Nuansa aulia.
- Setiawan, R, 1979.*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta.
- Simonangkir, Rudy T.Erwin.Prasetyo, J.C.T, 2003.*Kamus Hukum*, Jakarta : Aksara Baru.
- Soedarjadi, 2009.*Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha*, Yogyakarta : Pustaka Yustitia.
- Soekanto Sri Mamudji, Soerjono, 1986, *Penelitian Hukum Noermatif*, Jakarta : Rajawali.
- Subekti, 1996.*Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.
- Sunyoto, Danang, 2013.*Hak Dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha*, Jakarta : Pustaka Yustitia.
- Sutedi, Andrian, 2010.*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Suwarto, 2003.*Hubungan Industrial Dalam Praktek*, Jakarta : Penerbit Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia.
- Wardiono, Kelik, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen Sebuah Deskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yahya Harahap, M., 1986.*Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumnus.